

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KOTA CILEGON 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CILEGON**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
KOTA CILEGON
2016**



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KOTA CILEGON 2016

ISSN	: -
No Publikasi	: 36720.1719
Katalog	: 4102002.3672
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: viii + 67 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kota Cilegon
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kota Cilegon
Gambar Kover	: Badan Pusat Statistik Kota Cilegon
Diterbitkan oleh	: © Badan Pusat Statistik Kota Cilegon
Dicetak oleh	: CV. Teladan

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya publikasi **Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender Kota Cilegon 2016**. Publikasi ini memuat hasil pembangunan manusia Kota Cilegon, yang mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut terangkum dalam satu indeks komposit yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, publikasi ini juga memuat hasil pembangunan gender Kota Cilegon, yang merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.

Publikasi IPM dan IPG ini menyajikan data runtun waktu mengenai pembangunan manusia dan pembangunan manusia berbasis gender di Kota Cilegon, yang dihitung dengan menggunakan metode baru. Selain itu, juga diinformasikan mengenai komponen capaian manusia menurut jenis kelamin. Publikasi ini juga diperkaya dengan analisis singkat dan padat, mengenai IPM serta hubungannya dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Disadari bahwa publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak

yang telah berperan dalam membantu menyusun publikasi ini, sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Cilegon, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Cilegon

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape followed by a horizontal line and a small dot.

Bambang Suyatno

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I. Pendahuluan	1
Latar Belakang	3
Tujuan Penulisan.....	7
Sistematika Penulisan	7
Bab II. Metodologi IPM dan IPG	9
Sejarah penghitungan IPM	11
Alasan perubahan Metodologi	15
Cakupan perubahan Metodologi.....	16
Dampak perubahan Metodologi.....	18
Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia	19
Sejarah penghitungan IPG.....	23
Penghitugan IPG Metode Baru	24
Penyusunan Indeks Komposit	25
Perubahan Interpretasi IPG	28

Bab III. Pencapaian IPM Kota Cilegon, 2016.....	29
Pencapaian Meningkat, Status Pembangunan	
Manusia Tetap	31
Hidup Semakin Sehat dan Lebih Lama.....	33
Kualitas Pendidikan Meningkat,	
Peluang Terbuka luas.....	37
Standar Hidup Layak Semakin meningkat	41
Capaian Pembnagunan Manusia Kota Cilegon	42
 Bab IV. Pencapaian IPG Kota Cilegon, 2016.....	 45
Kondisi Kesehatan.....	48
Capaian Pendidikan.....	51
 Bab V. Hubungan IPM dan Indikator Sosial Ekonomi	 55
Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi	57
Hubungan IPM dan Kemiskinan.....	60
 Bab V. Kesimpulan.....	 63
Daftar Pustaka.....	69

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru UNDP	17
Tabel 2.2. Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru BPS	21
Tabel 2.3. Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG	26

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM	13
Gambar 3.1. Nilai dan Pertumbuhan IPM Kota Cilegon	32
Gambar 3.2. Perkembangan AHH Kota Cilegon	34
Gambar 3.3. Presentase Balaita Berumur 0-59 bulan yang Mendapat imunisasi lengkap, 2016	36
Gambar 3.4. Presentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 tahun yang melahirkan dalam 2 tahun terakhir, menurut penolong kelahiran.....	37
Gambar 3.5. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Hara pan Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon, 2010-2016.....	40
Gambar 3.6. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan, Penduduk Kota Cilegon, 2010-2016 (ribu rupiah)	41
Gambar 3.7. Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Banten	43
Gambar 4.1. Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin, 2010-2016	49
Gambar 4.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Kota Cilegon Usia 25 tahun ke atas, Menurut Jenis Kelamin	52
Gambar 5.1. Kategorisasi Hubungan Antara Pertumbuhan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Banten, 2016	59
Gambar 5.2. Kategorisasi Hubungan Antara Pertumbuhan IPM dan Presentase Penduduk Miskin , 2016	62

BAB I

PENDAHULUAN

<https://cilegon.kotapns.go.id>

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada awalnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai upaya peningkatan *Gross Domestic Bruto* (GDP) atau Produk Domestik Bruto. Namun seiring berjalannya waktu, negara-negara di dunia mulai menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun negara-negara tersebut mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan masalah-masalah lain seperti pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang timpang. Berdasarkan permasalahan tersebut, munculah pertanyaan mengapa terjadi *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi.

Saat ini, pembangunan ekonomi tidak lagi menekankan pada peningkatan kuantitas, melainkan lebih menekankan pada peningkatan kualitas dari proses pembangunan itu sendiri. Pergeseran makna pembangunan tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan tidak hanya semata-mata diarahkan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi pembangunan juga memiliki dimensi yang lebih luas dan diarahkan untuk mencapai tujuan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pendapatan.

Di Indonesia, paradigma pembangunan juga mengalami perkembangan. Pertama, paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*); kedua,

pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*); dan ketiga, paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development paradigm*).

Pembangunan ekonomi dengan pendekatan pembangunan manusia ditandai dengan pelaksanaan yang berorientasi pada pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan secara langsung sebagai subyek pembangunan.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), masyarakat adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya (*People are the real wealth of nations*). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran, serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Strategi pembangunan suatu negara harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun, pembangunan nasional secara menyeluruh nyatanya tidak dapat

dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Misi kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal yang diharapkan menghasilkan dua manfaat yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan.

Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat tercipta pembangunan yang lebih merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah.

Berdasarkan visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kota Cilegon yang Unggul dan Sejahtera Berbasis Industri Perdagangan dan Jasa, salah satu misi yang mengarahkan pencapaian visi tersebut adalah "Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial".

Untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta untuk merumuskan kebijakan selanjutnya maka dibutuhkan suatu alat ukur, salah satunya dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain masalah kesenjangan pembangunan, akhir-akhir ini isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan. Hal ini dikarenakan perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi akibat pengetahuan masyarakat tentang gender itu sendiri masih sangat lambat.

Sebagai contoh, di bidang ekonomi, perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun, pemilihan pekerjaan masih berbasis gender. Perempuan dianggap kaum yang lemah, pasif, dan dependen. Perempuan biasanya bekerja di seputar bidang pelayanan jasa seperti bidang administrasi, perawat, atau pelayan toko, dan hanya sedikit saja yang menduduki jabatan manager atau pengambil keputusan.

Oleh karena itu, sudah saatnya kaum perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses yang sama, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, politik, maupun ekonomi. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pembangunan ekonomi di Kota Cilegon dengan memperhatikan ketimpangan gender, maka akan dibahas mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG).

2. Tujuan Penulisan

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cilegon 2017 ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang dipresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disertai dengan analisis mengenai angka IPM menurut komponen pembentuknya. Selain itu disajikan pula informasi mengenai pencapaian pembangunan berbasis gender yang dipresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG).

3. Sistematika Penulisan

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cilegon 2017 terdiri dari lima bab.

Bab I. Menyajikan pendahuluan yang menguraikan secara rinci tentang latar belakang dan tujuan penulisan publikasi IPM dan IPG Tahun 2017

Bab II. Menjelaskan tentang perubahan metodologi IPM dan IPG yang terdiri dari sejarah penghitungan, alasan perubahan metodologi, cakupan perubahan, dampak perubahan metodologi, dan implementasi IPM dan IPG Metode Baru di Indonesia.

- Bab III. Disajikan pencapaian pembangunan manusia Kota Cilegon yang diukur melalui angka IPM dan angka pertumbuhan IPM Kota Cilegon, yang meliputi capaian menurut dimensinya.
- Bab IV. Disajikan pencapaian pembangunan manusia menurut gender Kota Cilegon yang diukur melalui angka IPG dan angka pertumbuhan IPG Kota Cilegon, yang meliputi capaian menurut dimensinya.
- Bab V. Membahas hubungan IPM dengan indikator sosial ekonomi lainnya, seperti hubungan antara IPM dan Pertumbuhan Ekonomi, serta hubungan antara IPM dan Kemiskinan.
- Bab VI. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan publikasi ini.

BAB II

METODOLOGI

<https://cilegonkota.bps.go.id>

Metodologi IPM dan IPG

2.1. Sejarah Penghitungan IPM

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit juga muncul kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak yang mengkritik berpendapat, bahwa indikator yang tercakup dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Kritikan itu dijawab oleh para pakar, dengan terus melakukan sosialisasi mengenai kelebihan-kelebihan IPM.

Tidak hanya itu, mereka juga melakukan kajian untuk menyempurnakan metodologi penghitungan IPM. Hal itu dilakukan terutama pada indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan, yaitu pada tahun 1991 dan 1995, serta perubahan metodologi di tahun 2010.

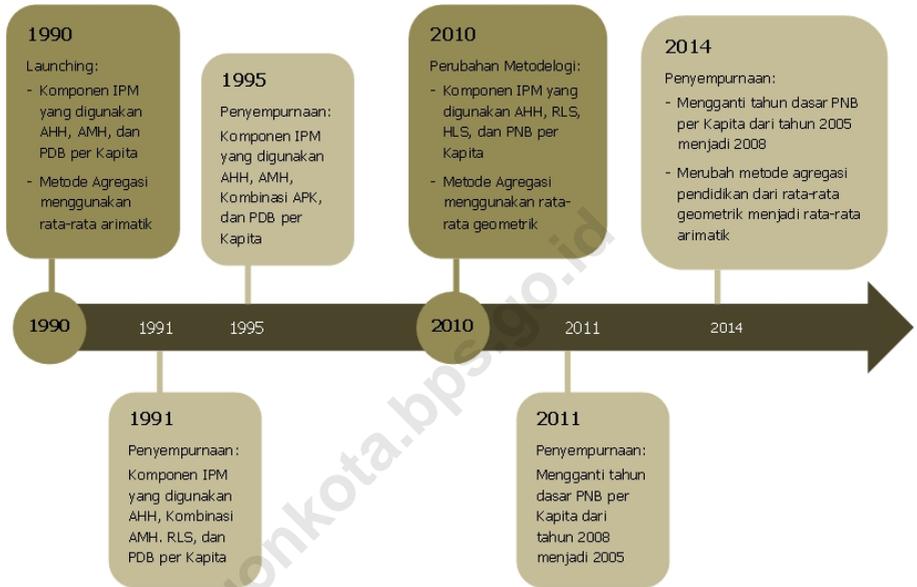
Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini, kemudian secara rutin setiap tahun dipublikasikan dalam *Human Development Report* (HDR) atau Laporan Pembangunan Manusia.

Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir,

dimensi pengetahuan menggunakan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak dengan PDB per kapita. Untuk merangkai ketiga dimensi itu hingga menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Oleh karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP kemudian memberi bobot kepada keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga.

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM oleh UNDP



Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup saat Lahir

AMH : Angka Melek Huruf

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

PDB : Produk Domestik Bruto

APK : Angka Partisipasi Kasar

HLS : Harapan Lama Sekolah

PNB : Pendapatan Nasional Bruto

Hingga tahun 1994, ke empat indikator tersebut masih digunakan dalam penghitungan IPM karena dianggap cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan metodologi penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP mengubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan.

Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP ternyata tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP mengubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita, yaitu dari tahun 2008 menjadi 2005.

Tiga tahun setelahnya, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik diubah menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita diubah kembali menjadi 2008. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP ini, bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

2.2. Alasan Perubahan Metodologi

Perubahan metodologi penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan berdasarkan alasan yang cukup rasional. Dasar perubahannya adalah suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan demikian, pemilihan metode dan variabel harus dilakukan secara tepat, sehingga indeks yang dihasilkan menjadi cukup relevan.

Ada dua alasan pokok yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh, karena tidak dapat menggambarkan perubahan kualitas pendidikan.

Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang demikian itu akan menyebabkan indikator yang dibentuk menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun, haruslah disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang ada di suatu wilayah. Di sisi lain, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan tingkat pendapatan atau bahkan

kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Kondisi ini menjadi kontra produktif, karena konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan.

Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Oleh sebab itu, penggunaan rumus rata-rata aritmatika menjadi tidak relevan lagi dalam menghitung capaian pembangunan manusia.

2.3. Cakupan Perubahan Metodologi

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru, dengan beberapa perbedaan nyata dibandingkan metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar tersebut, terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah (HLS). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang sudah tidak lagi relevan. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Tabel 2.1. Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Indikator	
	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks komposit, metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik. Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini, membuat indeks cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Dengan kata lain, rata-rata geometrik menuntut adanya keseimbangan dari ketiga dimensi, sehingga capaian IPM menjadi optimal.

2.4. Dampak Perubahan Metodologi

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM, tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru akan lebih rendah dibandingkan IPM metode lama. Hal ini terjadi karena adanya perubahan indikator dan cara penghitungan.

Penggantian indikator AMH menjadi HLS, membuat angka IPM menjadi rendah. Secara umum AMH sudah di atas 90 persen, sedangkan HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam menurunkan level IPM metode baru. Hal ini karena, ketimpangan antar dimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi, sedangkan perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan, karena keduanya menggunakan metode yang tidak sama.

Beberapa negara yang telah mencoba mengimplementasikan metode baru penghitungan IPM, mencatat adanya perubahan peringkat yang terjadi di tingkat regional.

Misalnya, China yang menerapkan metode baru di tingkat regional mulai tahun 2013 dengan menggunakan data tahun 2011. Hasilnya, cukup menggembirakan tetapi dampak yang muncul juga signifikan. Tercatat, beberapa provinsi mengalami perubahan drastis, antara lain Guangdong (4 menjadi 7), Hebei (10 menjadi 16), dan Henan (15 menjadi 20).

Filipina juga mengalami hal serupa. Terjadi perubahan peringkat yang tajam di tingkat regional. Misalnya, Abra (46 menjadi 51), Aklan (49 menjadi 63), Camiguin (28 menjadi 39), dan Albay (30 menjadi 43).

2.5. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbarui penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- ✓ Angka harapan hidup saat lahir (Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010)
- ✓ Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)
- ✓ Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan (SUSENAS).

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita, karena ketidakterdediaan data pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, diproksi dengan pengeluaran per kapita setahun disesuaikan.

Indikator angka harapan hidup saat lahir sangat penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai. Betapapun juga, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk 2010.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan harapan lama sekolah. Sementara, indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun demikian, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti.

Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Adapun pada metode baru, cakupannya adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP.

Selain untuk keterbandingan dengan dunia internasional, alasan penting lain yang mendasari perubahan cakupan adalah pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas sudah tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, tetapi jumlahnya tidak akan signifikan. Dengan demikian, penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Tabel 2.2. Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru BPS

Dimensi	Indikator	
	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per Kapita: 27 Komoditas Paritas Daya Beli	Pengeluaran per Kapita: 96 Komoditas Paritas Daya Beli
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
Perubahan Capaian	Reduksi <i>Shortfall</i> (RSF)	Pertumbuhan

Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya, karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Meskipun demikian, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli yang digunakan.

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Perubahan ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat, sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan IPM.

2.6. Sejarah Penghitungan IPG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah diperkenalkannya IPM. Pada saat itu, metode penghitungannya tidaklah dengan mengukur langsung ketimpangan antar gender, melainkan hanya mengukur disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG yang dihasilkannya juga tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Metodologi penghitungan yang demikian itu, terus dipertahankan oleh UNDP hingga tahun 2009. Sampai kemudian UNDP menghentikan penghitungan IPG pada tahun 2010-2013.

Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG, namun dengan menggunakan metode yang baru. Perubahan metode IPG ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian, dengan perubahan yang terjadi pada metodologi penghitungan IPM.

Berbeda dengan metode sebelumnya, IPG metode baru merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini mulai diperkenalkan IPM perempuan dan IPM laki-laki dan rasio antara keduanya. Implikasinya, perbedaan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki terlihat jelas.

2.7. Penghitungan IPG Metode Baru

Mulai tahun 2014 , penghitungan IPG mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan, baik terhadap indikator yang digunakan maupun metodologi penghitungannya. Namun dimensi yang digunakan masih tetap sama dengan metode sebelumnya, yaitu:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat (a long life and healthy life)
- 2) Pengetahuan (knowledge); dan
- 3) Standar hidup layak (decent standart of living).

Sementara dari sisi indikator, selain dimensi umur panjang dan sehat yang masih menggunakan angka harapan hidup, UNDP mengganti beberapa indikator untuk penyempurnaan metodologi. Pada dimensi pengetahuan, digunakan indikator pendidikan berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak, menggunakan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.

Semua perubahan yang dilakukan oleh UNDP diakomodir oleh BPS. Tercatat, dimensi umur panjang dan sehat, diukur dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang diperoleh dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Sementara pengukuran dimensi pengetahuan, dilakukan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun dan angka rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas, yang didapatkan dari data Susenas.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak, BPS tidak dapat menggunakan PNB perkapita, karena faktor ketersediaan data PNB per kapita hingga level kabupaten/kota. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan atau proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pada prinsipnya, keseluruhan indikator langsung dihitung menurut jenis kelamin. Hanya saja pada dimensi standar hidup layak, dibutuhkan beberapa data lain guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita penduduk laki-laki dan perempuan. Data yang digunakan adalah data upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

2.8. Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Secara umum, indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut ini adalah nilai maksimum dan minimum masing-masing komponen.

Tabel 2.3. Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Dimensi/Indikator		Minimum		Maksimum	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Umur panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup (tahun)	17,5	22,5	82,5	87,5
Pengetahuan	Sekolah (tahun)	0	0	18	18
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	0	0	15	15
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (rupiah setahun)	1.007,436		26.572.352	

Penyusunan indeks untuk indikator dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan (indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah), menggunakan rumus :

$$\text{Indeks } X_i = \frac{(X_i - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana : X_i = Nilai komponen IPM ke-i

$X_{(i-\min)}$ = Nilai minimum komponen IPM ke-i

$X_{(i-\max)}$ = Nilai maksimum komponen IPM ke-i

Sementara rumus yang digunakan untuk penghitungan indeks dalam dimensi standar hidup layak (indeks pendapatan) adalah :

$$\text{Indeks } Y = \frac{[\ln(y) - \ln(y_{\min})]}{[\ln(y_{\max}) - \ln(y_{\min})]}$$

Dimana:

y = Pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan

y_{\min} = Nilai minimum komponen pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan

y_{\max} = Nilai maksimum komponen pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan

Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan penghitungan indeks pendidikan. Penghitungan indeks pendidikan sendiri menggunakan rata-rata aritmatik, yaitu :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$$

Dimana:

Indeks HLS = Indeks harapan lama sekolah

Indeks RLS = indeks rata-rata lama sekolah

Adapun metode agregasi yang ditempuh guna mendapatkan angka IPM laki-laki (IPM_L) dan perempuan (IPM_P) sama seperti metode agregasi yang dilakukan pada saat penghitungan angka IPM.

Sementara penghitungan angka IPG nya pada metode baru, tidak lagi dilakukan dengan membandingkannya terhadap angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$IPG = \frac{IF}{IF} \frac{P}{L}$$

2.9. Perubahan Interpretasi IPG

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak lagi perlu dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara capaian pembangunan kapasitas laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jaraknya dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan.

BAB III
PENCAPAIAN
IPM KOTA CILEGON

<https://cilegonkota.go.id>

Pencapaian IPM

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Sebagai alat ukur, IPM dinilai sudah cukup memadai dalam hal menggambarkan capaian pembangunan manusia, dibandingkan dengan indeks komposit lainnya.

Dikatakan memadai karena IPM mencakup tiga dimensi pokok yang berperan besar dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Ketiga dimensi pokok tersebut adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Apabila ketiga dimensi tersebut menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, maka sumber daya manusianya diharapkan akan memiliki kualitas yang sejalan dengan perkembangan indeksinya.

1. Capaian Meningkat, Status Pembangunan Manusia Tetap

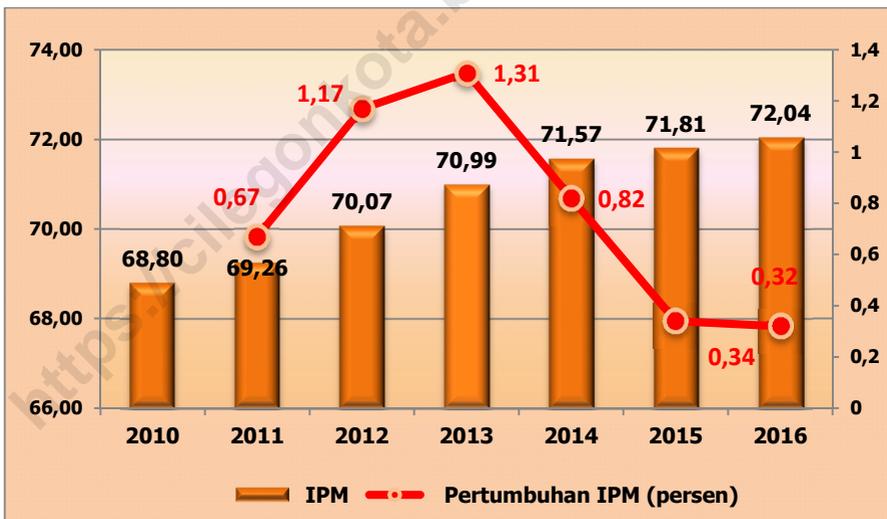
Perkembangan capaian pembangunan manusia di Kota Cilegon terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari naiknya angka IPM secara konsisten selama periode 2010–2016. Adapun besaran kenaikannya senilai 3,24 poin atau setara dengan 0,46 poin per tahun (Gambar 4.1).

Angka IPM Kota Cilegon pada tahun 2016 mencapai 72,04. Berarti, tingkat pencapaian pembangunan manusiannya dapat dikatakan masih

sekitar 72 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100).

Namun demikian, dengan capaian sebesar itu, Kota Cilegon menempati urutan ketiga di Provinsi Banten (setelah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang) dalam hal pembangunan manusia. Hanya saja, status pembangunan manusianya belum mengalami kenaikan, yakni masih berada pada kategori "Tinggi" ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$).

Gambar 3.1. Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon, Tahun 2010 - 2016



Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari besarnya angka IPM, akan tetapi juga harus dilihat dari kecepatan dalam peningkatannya. Untuk mengukur kecepatan peningkatan capaian pembangunan manusia, digunakan angka pertumbuhan IPM.

Angka IPM Kota Cilegon pada tahun 2016 mengalami sedikit perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 0,34 persen di tahun 2015 menjadi 0,32 persen di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak dibarengi dengan percepatan peningkatannya. Perlambatan peningkatan IPM membawa dampak kepada semakin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai IPM yang ideal.

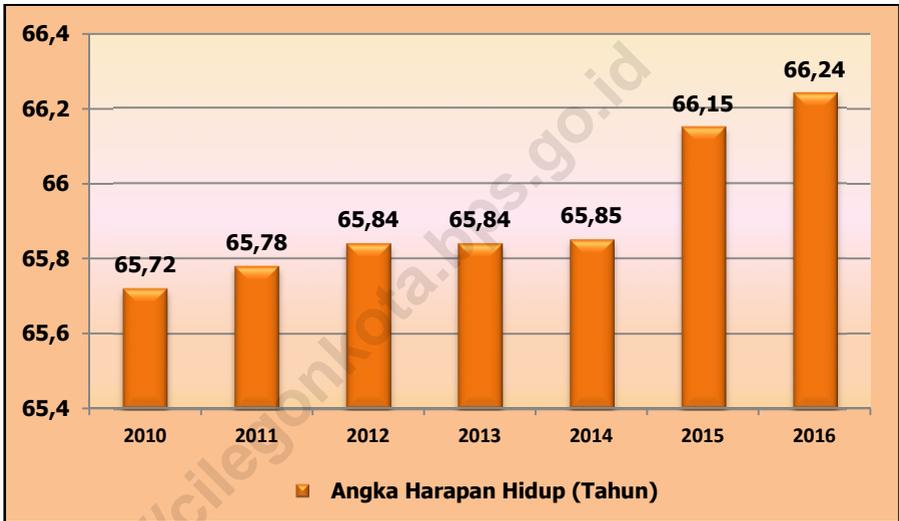
2. Hidup Semakin Sehat dan Lebih Lama

Hidup lebih lama dan sehat merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kondisi kesehatan yang lebih baik. Di sisi lain, tujuan pembangunan manusia adalah memperluas pilihan-pilihan bagu manusia, yang untuk memperoleh atau memanfaatkannya diperlukan umur yang panjang dan sehat. Dimensi umur panjang dan sehat ini, dalam pembangunan manusia didekati dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH).

AHH sendiri adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian, AHH juga menggambarkan derajat kesehatan yang telah dicapai oleh seseorang atau masyarakat. Semakin tinggi derajat kesehatannya, maka kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup.

Gambar 4.2 berikut menampilkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) dari tahun 2010 sampai tahun 2016.

Gambar 3.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Cilegon, Tahun 2010-2016 (tahun)



AHH yang mempresentasikan aspek kesehatan, terlihat terus meningkat selama kurun waktu 2010-2016 (Gambar 4.2). Meningkatnya AHH ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kota Cilegon sudah semakin membaik. Dengan kata lain, kehidupan masyarakatnya secara rata-rata menjadi lebih sehat, sehingga dapat hidup lebih lama.

AHH Kota Cilegon pada tahun 2016 mencapai 66,24 tahun. Artinya, setiap penduduk Kota Cilegon yang dilahirkan pada tahun 2016, dapat berharap untuk hidup sampai dengan usia 66 tahun lebih. AHH Kota Cilegon masih dibawah AHH Propinsi Banten, yaitu 66,46 tahun.

Beberapa faktor yang memengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH) antara lain: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Kasar (AKK). Dari keempat faktor tersebut, AKB dan AKI merupakan faktor yang paling sangat berpengaruh.

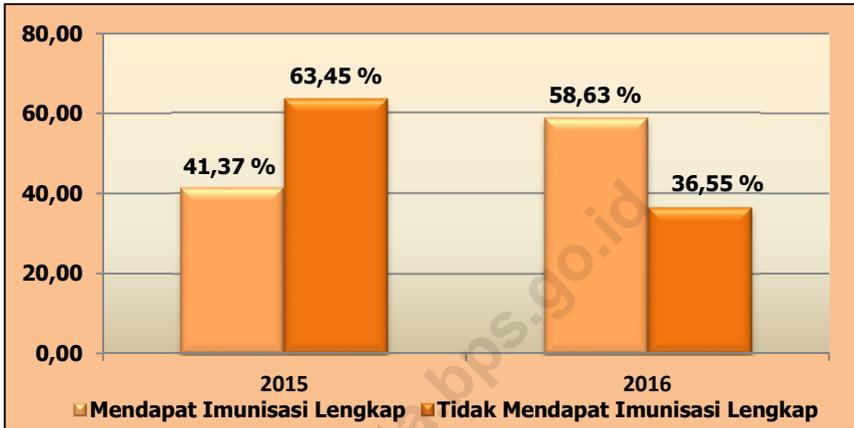
Angka harapan hidup dapat dinaikkan melalui perbaikan derajat kesehatan yang ditempuh melalui program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya yang diarahkan untuk menekan AKI dan AKB. Salah satu upaya untuk menekan AKI adalah melalui pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bersalin, sedangkan AKB dan AKBA dapat ditekan dengan pemberian imunisasi bagi balita.

- **Imunisasi**

Pembangunan kesehatan pada saat ini diarahkan kepada peningkatan upaya promotif dan preventif, disamping kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif adalah dengan dilaksanakannya program imunisasi. Imunisasi diharapkan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan angka harapan hidup karena mampu menekan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Berdasarkan Gambar 4.2 dan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa kenaikan presentasi balita berumur 0-59 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap (dari 41,37 persen menjadi 58,63 persen), berkorelasi positif dengan angka harapan hidup yang juga mengalami peningkatan, yaitu dari 66,15 menjadi 66,24.

Gambar 3.3. Persentase Balita Berumur 0-59 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap, Tahun 2016



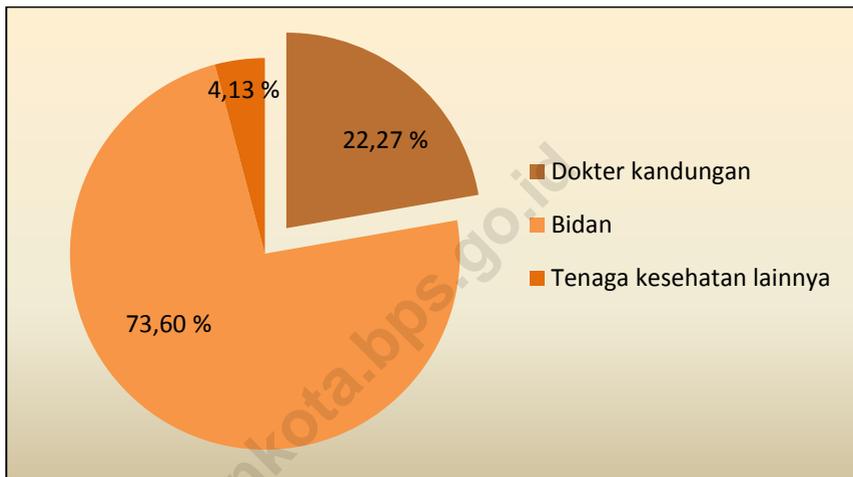
Demi terwujudnya generasi yang sehat maka diperlukan berbagai upaya percepatan program imunisasi. Peran seluruh pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat sangat dibutuhkan guna bekerja sama mewujudkan tujuan tersebut.

- **Pelayanan Bagi Ibu Bersalin**

Menurut penelitian sebuah NGO (Non-Governmental Organization), salah satu penyebab masih tingginya angka kematian ibu adalah karena terbatasnya akses menuju fasilitas kesehatan. Perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan memungkinkan untuk memperoleh pelayanan obstetrik darurat dan perawatan bayi baru lahir.

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa perempuan usia 15-49 tahun yang dua tahun terakhir melahirkan, sebanyak 4,13 % masih ditolong oleh selain tenaga medis.

Gambar 3.4. Presentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir, Menurut Penolong Kelahiran



3. Kualitas Pendidikan Meningkatkan, Peluang Terbuka Luas

Pendidikan mampu meningkatkan kualitas atau kemampuan diri seseorang, sesuai dengan potensi masing-masing. Kemampuan diri inilah yang digunakan oleh manusia yang berpendidikan, untuk memperhatikan kualitas hidupnya agar dapat hidup lebih lama.

Tidak hanya itu, dengan kemampuan diri yang meningkat, manusia yang berpendidikan akan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, agar semakin terbuka peluang bagi mereka. Atau dengan kata lain, pendidikan memperluas peluang atau pilihan hidup.

Begitu pentingnya peran pendidikan ini, sehingga fokus pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, juga memperluas akses atau kesempatan dalam memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, adalah meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan dunia usaha.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan semakin terbukanya kesempatan dalam mengenyam pendidikan, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi tersebut tentu membutuhkan dukungan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Sementara tingkat keberhasilannya, dapat diketahui dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Kedua indikator pendidikan di atas, juga digunakan dalam pengukuran capaian pembangunan manusia, untuk mewakili dimensi pengetahuan. Dengan demikian, ada kesesuaian antara program pemerintah dengan pembangunan manusia.

RLS Kota Cilegon sendiri selama periode 2010-2016 terus mengalami peningkatan (Gambar 4.5). Peningkatan ini menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Cilegon secara rata-rata telah meningkat. Dengan demikian, semakin terbukanya peluang bagi

penduduk Kota Cilegon untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya.

Peningkatan kualitas pendidikan penduduk Kota Cilegon terasa sangat lambat. Pada tahun 2010, rata-rata penduduk Kota Cilegon yang berusia 25 tahun ke atas, bersekolah hingga kelas 3 SMP. Enam tahun kemudian, rata-rata lama sekolahnya bertambah satu tahun menjadi kelas 1 SMA. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah ini masih di atas RLS Provinsi Banten yang hanya sampai kelas 3 SMP.

Sementara itu, HLS Kota Cilegon pada periode yang sama juga terus meningkat (Gambar 4.5). Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam hal sarana dan pra sarana pendidikan serta tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Adapun perbaikannya itu juga menjadi penanda bahwa system pendidikan di Kota Cilegon selama ini sudah berjalan pada arah yang benar.

Gambar 3.5. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon, 2010-2016



HLS Kota Cilegon pada tahun 2016 mencapai 13,11 tahun, yang setara dengan kuliah sampai Semester 3. Sementara pada saat yang bersamaan, penduduk Provinsi Banten umumnya hanya bersekolah sampai dengan kuliah Semester 1. Dengan demikian, sistem pendidikan di Kota Cilegon sudah berjalan sangat baik.

Meningkatnya HLS Kota Cilegon mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan Kota Cilegon pada masa yang akan datang akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan HLS menggambarkan rata-rata lama sekolah yang dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun selama masa hidupnya.

4. Standar Hidup Layak Semakin Meningkat

Dimensi terakhir yang menggambarkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dimensi ini direpresentasikan dengan menggunakan indikator pengeluaran per kapita setahun disesuaikan. Adapun indikator pengeluaran sendiri dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk. Selain itu berdasarkan data historis, sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian, sehingga cocok untuk digunakan sebagai proksi standar hidup layak.

Gambar 3.6. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan, Penduduk Kota Cilegon, 2010-2016 (ribu rupiah)



Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan Kota Cilegon selama tujuh tahun terakhir ini, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 4.6 terlihat terus meningkat. Namun peningkatannya ternyata berjalan

lambat, karena dalam setahun rata-rata hanya bertambah sekitar 87 ribu rupiah. Akan tetapi, rata-rata nilai pengeluarannya mencapai 12,33 juta rupiah, jauh di atas rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang hanya 11,47 juta, bahkan di atas rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia yang hanya 10,4 juta rupiah.

5. Capaian Pembangunan Manusia Kota Cilegon di tingkat Provinsi Banten

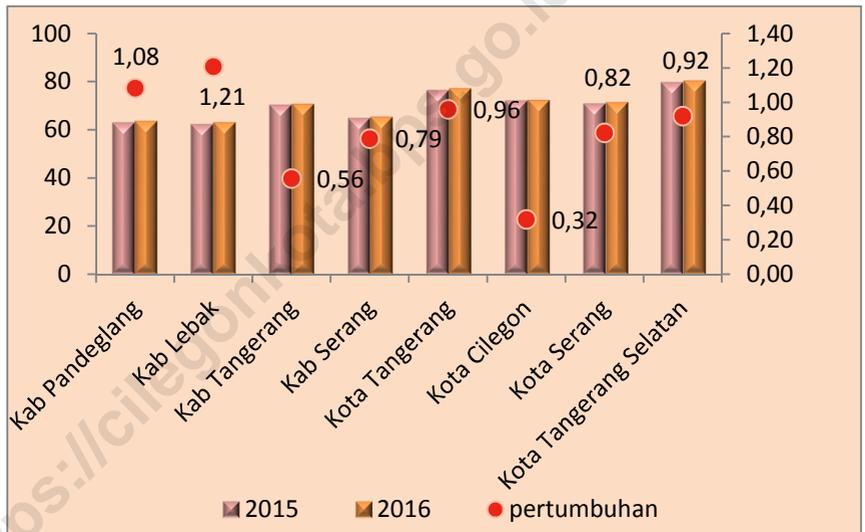
Perbedaan letak geografis, keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta perbedaan dalam struktur ekonomi dan ketenagakerjaan antar daerah, akan menghasilkan capaian pembangunan manusia yang berbeda pada setiap daerah.

Di samping itu, adanya perbedaan strategi dan fokus pembangunan, serta keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, juga menentukan tinggi rendah dan kecepatan capaian pembangunan manusia pada setiap daerah.

Capaian pembangunan manusia Kota Cilegon pada tahun 2016 di Level Provinsi Banten sudah baik. Penilaian ini setidaknya didasarkan pada peringkat IPM yang berada di peringkat ketiga se Provinsi Banten setelah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

Betapapun juga, memang ada perbedaan capaian yang nyata antar kabupaten/kota. Berdasarkan data historis, IPM wilayah kota selalu lebih besar daripada wilayah kabupaten.

Gambar 3.7. Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Banten, 2015-2016



BAB IV
PENCAPAIAN
IPG KOTA CILEGON

<https://cilegon.ipg.ac.id>

Pencapaian IPG

Isu tentang gender telah lama menjadi pokok bahasan di kalangan masyarakat. Orang awam membicarakannya, karena terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sementara akademisi, menjadikannya sebagai topik utama dalam berbagai perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Bahkan, ada pula mereka yang khusus membicarakannya dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah.

Istilah gender sendiri dikemukakan oleh para ilmuwan sosial, untuk menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang dimaksud bukanlah dari jenis kelamin, melainkan dari sisi peran, fungsi dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Adanya perbedaan gender dalam masyarakat, sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan, sepanjang perbedaannya tidak menimbulkan diskriminasi. Hanya saja, ideologi gender yang selama ini berkembang di masyarakat telah menentukan bahwa urusan rumah tangga atau urusan domestik adalah tugas perempuan. Sementara tugas mencari nafkah/penghasilan adalah urusan laki-laki.

Dikotomi peran yang demikian inilah yang kemudian diiringi

Di dalam bab IV ini akan disampaikan tentang informasi mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender, yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG).

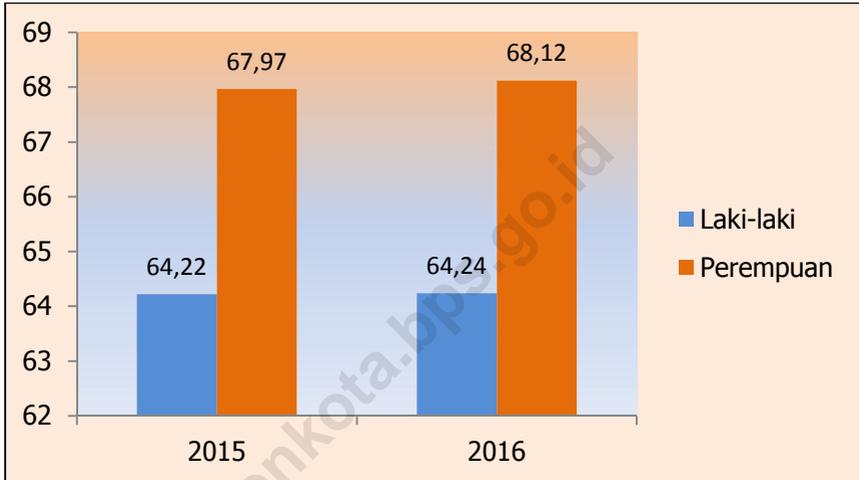
Kondisi Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi HAM PBB tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia. Oleh sebab itu, sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.

Wujud dari pemenuhan hak-hak asasi kesehatan adalah pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat. Caranya, dengan menyediakan sarana kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status ekonomi dan sosial, termasuk gender sekalipun.

**Gambar 4.1. Angka Harapan Hidup (AHH)
Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin,
2015-2016 (tahun)**



Jika kita lihat Gambar 4.1, terlihat bahwa dari tahun ke tahun, lama hidup penduduk perempuan di Kota Cilegon lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Lebih lamanya rata-rata hidup perempuan merupakan fenomena umum yang terjadi. Namun terjadinya bukan karena diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Menurut *Centers For Disease Control and Prevention* (dalam 5 Alasan Wanita Lebih Panjang Umur Dibanding Pria), fenomena ini disebabkan oleh :

1. Wanita lebih kuat dalam kandungan
Janin bayi laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan. Selain itu, sebelum dilahirkan perkembangan fisik laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan. Kondisi inilah yang menjadi penyebab mengapa laki-laki lebih beresiko meninggal jika lahir prematur.
2. Wanita penuh perhitungan
Lobus frontal otak merupakan bagian dari otak yang berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko perhitungan. *Lobus frontal* pada wanita berkembang lebih cepat, sehingga mereka tidak mudah terkena cedera yang tak sengaja. Sebaliknya, cedera tersebut bukan hanya seringkali menimpa laki-laki, bahkan jadi penyebab utama ketiga bagi kematiannya.
3. Wanita lebih kuat hadapi penyakit jantung.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) pernah merilis bahwa penyakit jantung menjadi pembunuh nomor satu bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, kecenderungan perkembangan penyakit ini dan risiko meninggal paling cepat pada usia 30-an dan 40-an, dimiliki oleh pria. Sementara pada wanita, perkembangannya membutuhkan waktu 10 tahun lebih lama. Kondisi tersebut dapat terjadi karena wanita memiliki hormon estrogen yang membuat arteri mereka menjadi lebih kuat dan fleksibel.

4. Sifat sosial wanita lebih kuat

Berdasarkan penelitian pada tahun 2010 di Brigham Young University, kebiasaan seorang wanita untuk mengungkapkan kekhawatirannya melalui curhat atau berbicara kepada orang lain, ternyata dapat mengurangi risiko meninggal hingga 50 persen. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa tingkat harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

5. Wanita lebih menjaga kesehatan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih memperhatikan kesehatan dibandingkan laki-laki.

Capaian Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Bahkan, pendidikan merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia yang merdeka sebagaimana yang tercantun dalam pembukaan UUD 1945.

Di sisi lain, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini karena melalui pendidikan, manusia dapat terus menerus mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemampuan mengembangkan diri inilah yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka sehari-hari.

Oleh karena itu, pemerintah wajib membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk bersekolah, terlepas dari apapun latar belakang status ekonomi dan sosial mereka.

Gambar 4.2.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Kota Cilegon
Usia 25 Tahun Keatas Menurut Kelamin, 2015-2016



Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Laki-laki usia 25 tahun keatas lebih lama dibanding RLS penduduk perempuan. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan budaya patrilineal yang telah lama ada di tengah masyarakat, dimana perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan menjadi keluarga orang lain atau bertugas di dapur.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan jaman, budaya patrilineal di tengah masyarakat cenderung memudar. Kondisi ini ditandai dengan semakin luasnya akses perempuan dalam dunia pendidikan yang ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS sendiri adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan dapat ditempuh di masa-masa mendatang oleh penduduk berusia 7 tahun.

<https://cilegonkota.bps.go.id>

BAB V
HUBUNGAN IPM DAN
INDIKATOR EKONOMI
DAN SOSIAL

<https://id.goni.ac.id/ps-go.id>

Hubungan IPM dan Indikator Sosial Ekonomi

5.1. Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

Modal manusia (human capital), merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang alat ukurnya adalah meningkatnya output atau pertumbuhan ekonomi, diyakini akan menjadi lebih baik.

Demikian pula sebaliknya, pembangunan ekonomi dapat pula meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi akan menjamin tersediannya dana yang cukup, guna peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi atau yang lebih dikenal sebagai hubungan dua arah, antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Menurut Ramirez dkk (1998), pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga, pemerintah dan perusahaan, serta organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Semua aktivitas tersebut berkaitan dengan pengeluaran yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan peningkatan kualitas manusia. Pengeluaran-pengeluaran ini antara lain adalah pengeluaran untuk makanan dan gizi (rumah

tangga), serta pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan pelatihan ketenagakerjaan (rumah tangga, pemerintah, dan institusi lainnya).

Adapun tingkat pembangunan manusia yang tinggi, dalam arti tingkat kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan yang tinggi, akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas, produktivitas, dan kreativitas penduduk (tenaga kerja).

Berkaitan dengan hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, UNDP melakukan kategorisasi hubungan tersebut menjadi hubungan yang seimbang (kuat dan lemah), dan tidak seimbang. Hubungan manusia dikatakan seimbang jika laju pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan manusia berlangsung relatif cepat (hubungan yang kuat), atau keduanya berlangsung relatif lambat (hubungan yang lemah). Sementara itu hubungan dikatakan tidak seimbang bila laju pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan relatif cepat tetapi pembangunan manusia relatif lambat, atau sebaliknya.

Dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan pertumbuhan IPM Banten sebagai *cut of point*, maka kategorisasi hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1. Kategorisasi Hubungan Antara Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Banten, 2016



Berdasarkan gambar 5.1 di atas, dapat kita ketahui bahwa hubungan antara pertumbuhan IPM dan pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon pada tahun 2016 termasuk dalam kategori hubungan yang lemah.

Hubungan yang lemah tersebut dapat disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah menyebabkan pendanaan atau investasi untuk pembangunan manusia, terutama dalam pencapaian status kesehatan, gizi, dan pendidikan, menjadi lebih lambat penambahannya. Kondisi yang demikian juga menyebabkan sulitnya dalam mencapai peningkatan pendapatan.

Beberapa saran yang diajukan oleh UNDP untuk daerah yang berada dalam kategori lambat adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan upaya besar untuk menciptakan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan manusia
2. Upaya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan memperbaiki distribusi pendapatan dan dengan memfokuskan pada penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
3. Subsidi harus disediakan bagi program-program sosial yang menjangkau rakyat banyak.

5.2. Hubungan IPM dan Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang umum digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah presentase penduduk miskin. Presentase penduduk sendiri adalah presentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

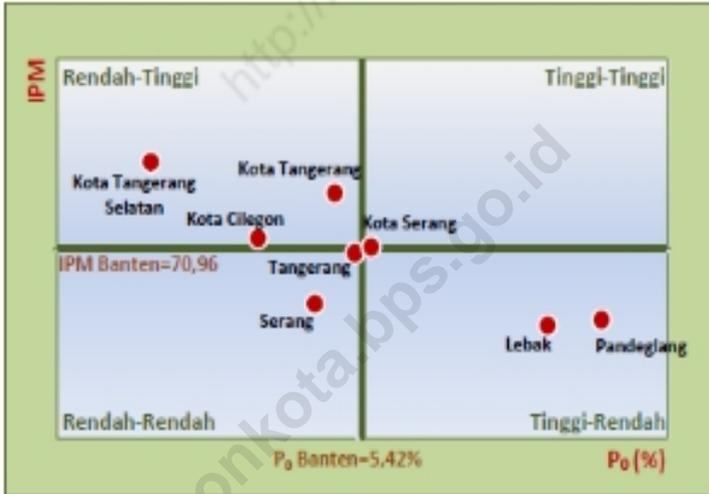
Walaupun demikian, kemiskinan sesungguhnya memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat dari peluang untuk memperoleh kesehatan dan umur yang panjang, peluang memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dan lain-lain. Intinya kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan hidup.

Apabila kemiskinan berkaitan erat dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia,

terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik, idealnya memiliki presentase penduduk miskin yang rendah.

Dengan menggunakan angka kemiskinan Banten sebagai *cut of point*, maka kabupaten/kota terbagi kedalam empat kategori. Dalam hal ini, presentase penduduk miskin suatu kabupaten/kota tinggi, bila lebih besar dari presentase penduduk miskin Banten (5,90 persen) dan dikatakan rendah bila lebih kecil dari nilai tersebut. Begitu juga IPM, dikatakan tinggi bila lebih besar dari IPM Banten (70,27) dan dikatakan rendah bila lebih kecil dari nilai tersebut. Keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2. Kategorisasi Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Presentase Penduduk Miskin (P0) di Banten, 2016



Berdasarkan Gambar 5.2 dapat diketahui bahwa Kota Cilegon termasuk dalam kategori Rendah-Tinggi. Kabupaten/kota dalam kategori ini adalah dalam kondisi ideal. Artinya, pemerintah Kota Cilegon telah cukup berhasil dalam menekan angka kemiskinan dan pada saat yang sama mampu meraih capaian pembangunan manusia yang tinggi.

BAB VI

KESIMPULAN

<https://cilegonkota.kps.go.id>

Kesimpulan

Pencapaian IPM Kota Cilegon 2016

- Angka IPM Kota Cilegon pada tahun 2016 mencapai 72,04. Berarti, tingkat pencapaian pembangunan manusiannya dapat dikatakan masih sekitar 72 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100)
- Status pembangunan manusia Kota Cilegon tahun 2016 masih berada pada kategori "Tinggi" ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$)
- Angka harapan hidup yang mempresentasikan dimensi kesehatan, pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Besarnya sendiri mencapai 66,24 tahun, yang berarti setiap penduduk Kota Cilegon yang dilahirkan pada tahun 2016 dapat berharap hidup sampai usia 66 tahun lebih.
- Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili dimensi pengetahuan, pada tahun 2016 sama-sama mengalami peningkatan.
- Harapan lama sekolah pada tahun 2016 mencapai 13,11 tahun. Berarti, setiap penduduk Kota Cilegon yang berusia 7 tahun pada tahun 2016, dapat berharap untuk bersekolah selama 13 tahun lebih, atau kuliah sampai semester 3.

- Rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 mencapai 9,68 tahun. Berarti, setiap penduduk Kota Cilegon yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2016, rata-rata bersekolah hingga setara kelas 1 SMA.
- Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan yang mempresentasikan standar hidup layak, pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Besaran pengeluarannya sendiri mencapai 12,326 juta rupiah, jauh di atas rata-rata pengeluaran penduduk Banten yang ahanya sebesar 11,5 juta rupiah.

Pencapaian IPG Kota Cilegon 2016

- Dari sisi kesehatan, kondisi kesehatan penduduk perempuan di Kota Cilegon lebih baik dibanding penduduk laki-laki, yang ditandai oleh lebih besarnya angka harapan hidup (AHH) penduduk perempuan. Lama hidup perempuan sendiri secara rata-rata lebih panjang empat tahun dibandingkan laki-laki.
- Dari segi pendidikan, kualitas pendidikan perempuan Kota Cilegon lebih rendah dibanding laki-laki. Kondisi ini ditandai oleh rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang lebih singkat dibandingkan laki-laki.
- Pada masa mendatang, dunia pendidikan di Kota Cilegon akan semakin terbuka bagi kaum perempuan. Hal ini terlihat dari angka harapan lama sekolah (HLS) penduduk perempuan usia 7

tahun ke atas, lebih tinggi dibanding HLS penduduk laki-laki usia 7 tahun ke atas.

Hubungan IPM dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

- Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas penduduk di Kota Cilegon saling berdampak positif satu sama lain, namun dampaknya masih sangat lemah. Maksudnya laju pertumbuhan ekonomi yang masih rendah menyebabkan pembangunan kualitas penduduk yang lamban penambahannya.
- Kota Cilegon merupakan salah satu daerah di Banten yang kondisinya baik, selain Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini, tingkat kemiskinan rendah dan capaian pembangunan manusia relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Banten.

Daftar Pustaka.

BPS Provinsi Banten. 2017. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2016. BPS: Serang.

BPS Provinsi Banten. 2017. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2016. BPS: Serang.

<https://cilegonkota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://cilegonkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CILEGON**

Jl. Sukabumi Kavling Blok 1, Cilegon 42418
Telp. 0254385524, Fax. 0254 385040
Email: bps3672@bps.go.id WebSite: cilegonkota.bps.go.id